

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Model.

Berdasarkan surat keputusan kepala sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 800/071/IV.01/2010, BP3K Model merupakan percontohan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasi agribisnis sesuai komoditas unggulan di wilayah setempat yang memadai dan mampu memberi pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. BP3K Model tahun 2010 dialokasikan kepada 366 balai penyuluhan kecamatan di 224 kabupaten/ kota, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

PRA merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program operasional dalam pembangunan tingkat desa. Tujuan utama dari PRA adalah menjaring rencana atau program pembangunan pedesaan yang memenuhi persyaratan. Syarat tersebut yaitu dapat diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan dan berdampak positif bagi lingkungan.

b. Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

RDK adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Pelaksanaan RDK dan RDKK dapat membantu petani dalam merencanakan kegiatan usahatani agar dapat berjalan dengan baik.

c. Kaji terap

Kaji terap merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memilih paket teknologi usahatani yang telah direkomendasikan sebelum di demonstrasikan atau dianjurkan. Tujuan pelaksanaan kaji terap adalah meyakinkan paket teknologi usahatani yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta kondisi usahatani petani dan sosial ekonomi petani di wilayahnya serta mempercepat penyebaran informasi teknologi pertanian yang telah direkomendasikan secara umum.

d. Percontohan atau Demplot

Demplot merupakan wahana percontohan penerapan teknologi yang benar-benar sesuai dengan rekomendasi untuk dapat dicontoh oleh petani peserta kursus tani sekaligus sebagai media pembuktian keunggulan pendekatan dan teknologi yang dianjurkan. Teknologi

yang telah dicontohkan diharapkan lebih baik dari yang tidak menerapkan teknologi, dan hasil teknologi yang diterapkan dalam demplot ini akan menjadi acuan bagi petani dalam melaksanakan budidaya usahatani. Demplot merupakan kegiatan lanjutan setelah kaji terap yang dilaksanakan oleh peserta kursus tani dan kaji terap

e. Kursus Tani

Kursus tani merupakan tindak lanjut dari kegiatan PRA, sehingga dilaksanakan setelah kegiatan PRA. Tujuan pelaksanaan kursus tani yaitu meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan petani serta mampu menerapkan teknologi yang menguntungkan yang diberikan melalui penyampaian materi-materi pada kursus tani.

f. Latihan dan Kunjungan (LAKU)

Latihan dan kunjungan merupakan salah satu kegiatan penyuluhan pertanian dan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan dalam penyuluhan. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktik fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif. Sedangkan kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

g. Media informasi

Salah satu tujuan pembentukan BP3K Model adalah menjadi kelembagaan (BP3K) yang dapat dijadikan contoh untuk BP3K lainnya. Oleh karena itu BP3K Model harus meemiliki sarana dan

prasarana yang memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan mendukung penyuluh dalam kapasitasnya memfasilitasi proses pembelajaran. Media informasi dan data base meliputi sarana informasi (brosur, leaflet, papan display informasi database), monografi wilayah, data kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau penyuluh pertanian beserta jenis usaha dan kepemilikan lahan dan lain sebagainya.

- h. Pemutakhiran data base kelembagaan/ketenagaan penyuluhan
- Pemutakhiran data base kelembagaan ketenagaan penyuluhan adalah pembuatan data base kelembagaan penyuluhan yang akurat dan aktual.

Jumlah anggaran untuk kegiatan BP3K Model sebesar Rp.100.000.000,- per BP3K. Alokasi anggaran tersebut diutamakan bagi BP3K Model yang sudah dikembangkan pada tahun sebelumnya. Persyaratan BP3K Model sebagai berikut :

1. Status kepemilikan lahan BP3K milik sendiri.
2. Memiliki bangunan yang layak (sarana, jaringan listrik, dan telepon).
3. Memiliki lahan untuk percontohan yang bersebelahan dengan BP3K Model.
4. Memiliki minimal 5 orang penyuluh (Bakorluh, 2010).

Menurut Departemen Pertanian (2007) balai penyuluhan pada tingkat kecamatan mempunyai tugas :

1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota.

2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
5. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan.

Definisi kinerja menurut Lawler dan Portner (1967, dalam Sutrisno, 2010) adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Menurut Prawirosentono (1999, dalam Sutrisno, 2010), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

Mathis (2002) mengemukakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain yaitu: kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Sedangkan

penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka dibandingkan dengan satu set standard an kemudian mengkomunikasikannya dengan karyawan.

Manullang (2001) juga mengemukakan bahwa pengukuran kerja adalah suatu alat untuk menentukan banyaknya pekerjaan yang seharusnya dihasilkan oleh seorang pekerja atau sekelompok pekerja dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kerja juga merupakan sebuah prosedur pengukuran formal yang digunakan untuk menempatkan suatu dimensi waktu dengan ketepatan yang wajar atas suatu unit pekerjaan. Sasaran dari pengukuran kerja itu sendiri adalah menciptakan standar-standar yang didasarkan atas waktu serta keterampilan yang diperlukan seorang karyawan guna melaksanakan suatu tugas.

Menurut Miner (1990, dalam Sutrisno, 2010), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Menurut Irianto (2001, dalam Sutrisno, 2010), kinerja adalah prestasi yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas. Kinerja menurut Cormick dan Tiffin (1980, dalam Sutrisno, 2010) adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan. Waktu

kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud kinerja adalah hasil kerja seseorang dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Sutrisno, 2010). Miner (1990, dalam Sutrisno, 2010), mengemukakan secara umum dapat dinyatakan empat aspek dari kinerja, yaitu :

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan beberapa produk atau jasa yang dapat dihasilkan.
3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani seseorang tersebut.
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Dengan keempat aspek kinerja di atas dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai kinerja yang baik bila dia berhasil memenuhi keempat aspek tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Swanson dan Graudous (2000, dalam Sutrisno, 2010), menjelaskan bahwa dalam sistem, berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan. Hasil dari seperangkat pekerjaan adalah masukan bagi usaha kinerja lainnya.

Kartasapoetra (1988), sifat-sifat yang harus dimiliki penyuluh pertanian yang sebenarnya dapat menggambarkan kinerja penyuluh adalah memiliki

disiplin kerja yang kuat, tekun, tahu akan tugasnya, dan tidak cepat putus asa. Menurut Suhardiyono (1992), syarat-syarat yang harus ada dalam diri penyuluh pertanian adalah:

- a. Kemampuan berkomunikasi dengan petani. Agar dapat berkomunikasi dengan petani, maka seorang penyuluh harus memiliki dasar-dasar pengetahuan praktik usahatani, dapat memahami bagaimana kehidupan petani, kemampuan mengenal orang desa dan mau mendengarkan serta mau mengerti terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh mereka.
- b. Kemampuan bergaul dengan orang lain. Agar dapat menyatu dengan petani, maka seorang penyuluh harus memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain.
- c. Antusias terhadap tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyuluh memerlukan tanggung jawab yang besar, karena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk bekerja sendiri dengan bimbingan dan pengawasan yang sangat minim, sehingga sebelum bertugas seorang penyuluh harus mengerti dan menghayati betapa besar tanggung jawab yang harus dipikulnya.
- d. Berpikir logis dan berinisiatif. Berpikir logis merupakan pengertian praktis yang harus dimiliki oleh seseorang, biasanya diperoleh dari pengalaman hidup, sedangkan inisiatif adalah kemampuan seseorang untuk melihat apakah ada sesuatu hal yang perlu dilakukan dan mempunyai keberanian untuk berusaha melakukan sesuatu hal tersebut tanpa perintah atau saran dari orang lain.

Menurut Kartasapoetra (1988), para Penyuluh Pertanian Lapangan akan mengemban tugas pokok sebagai berikut : menyebarkan informasi pertanian yang bermanfaat, mengajarkan keterampilan yang lebih baik, memberikan saran-saran atau rekomendasi bagi usahatani yang lebih menguntungkan, membantu mengikhtiarkan sarana produksi, fasilitas kerja serta bahan informasi pertanian yang diperlukan para petani dan mengembangkan swakarya dan swasembada para petani agar taraf kehidupannya dapat lebih meningkat.

Dalam modul pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian, 2010) menyatakan bahwa tugas pokok penyuluh pertanian di BP3K adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program penyuluhan pertanian

Program penyuluhan pertanian merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan serta didasarkan pada kebutuhan pelaku utama/petani dan pelaku usaha/pengusaha di bidang pertanian.

Programa untuk tingkat desa, digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelaksanaan PRA. Penggalian data dan informasi meliputi data potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan kelompok tani/gabungan kelompok tani, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, penggalian data dan informasi ini dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Hasil penggalian data informasi tersebut dijadikan masukan untuk membuat RDK dan RDKK. Penyusunan program telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluhan pertanian
Rencana kerja penyuluhan pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
3. Menyusun data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi

Peta wilayah merupakan gambaran suatu wilayah dengan skala tertentu yang disertai dengan keterangan-keterangan tentang batas desa, jalan, pemukiman penduduk, serta potensi sumber daya alam daerah tersebut. Penyusunan data peta wilayah dilakukan penyuluh secara bersama-

sama dengan koordinator penyuluh berdasarkan data yang diperoleh dari identifikasi potensi wilayah per desa.

4. Menyebarluaskan informasi teknologi pertanian secara merata
Penyuluh berkewajiban mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi teknologi agar petani dapat mengembangkan usahanya. Dengan kata lain Penyuluh juga bertugas menyediakan dan menyebar informasi teknologi kepada petani.
5. Menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha
Penyuluh berkewajiban memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.
6. mewujudkan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan
Penyuluh berkewajiban memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan pelaku utama guna membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
7. Mewujudkan akses petani ke lembaga keuangan, informasi dan sarana produksi
Penyuluh berkewajiban memfasilitasi informasi akses lembaga keuangan dan sarana produksi yang berguna bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap organisasi penyuluhan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan organisasi penyuluhan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi tenaga penyuluh pertanian dalam mencapai sasaran organisasi penyuluhan dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.

Pengukuran kinerja sangat berperan nantinya dalam proses evaluasi kinerja organisasi penyuluhan. Evaluasi kinerja adalah proses membandingkan antara kinerja aktual dan target yang telah direncanakan oleh manajemen, untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi penyuluhan dan untuk mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, kinerja penyuluh pertanian dapat dinilai dari pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Pertanian.

3. Produktivitas padi

Produktivitas merupakan perbandingan hasil yang telah dicapai dengan jumlah faktor produksi yang digunakan yaitu: tenaga kerja, lahan dan input lainnya (Hernanto, 1991). Berdasarkan peraturan menteri pertanian No 25/permentan/OT.140/5/2009, produktivitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual) maupun

potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

Selanjutnya Mubyarto (1997) mengatakan bahwa produktivitas merupakan penggabungan antara konsepsi efisiensi usaha dengan kapasitas tanah.

Efisiensi usaha mengukur banyaknya hasil produksi yang dapat diperoleh dari satu kesatuan input, sedangkan kapasitas dari sebidang tanah tertentu menggambarkan kemampuan tanah itu untuk menyerap tenaga dan modal sehingga memberikan hasil produksi bruto yang sebesar-besarnya pada tingkatan teknologi tertentu. Jadi produktivitas tanah adalah pembagian antara efisiensi usaha (produksi) dengan kapasitas (tanah). Hal-hal yang menyangkut kombinasi faktor-faktor produksi dalam pertanian yaitu :

1. Faktor produksi tanah

Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting, hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Tanah merupakan satu faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja dapat pula dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tanah dalam masyarakat dan daerah tertentu.

Perkembangan perekonomian mengakibatkan kebutuhan manusia akan tanah tidaklah terbatas pada kebutuhan untuk memproduksi bahan makanan dan sandang.

2. Faktor produksi modal

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian.

3. Faktor produksi tenaga kerja

Pembicaraan mengenai tenaga kerja dalam pertanian di Indonesia harus dibedakan ke dalam persoalan tenaga kerja dalam usahatani kecil-kecilan (usahatani pertanian rakyat) dan persoalan tenaga kerja dalam perusahaan pertanian yang besar-besar yaitu perkebunan, kehutanan, peternakan dan sebagainya. Perbedaan ini penting karena apa yang dikenal sebagai tenaga kerja dalam usahatani tidaklah sama pengertiannya secara ekonomis dengan pengertian tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan dalam perkebunan.

4. Faktor produksi pengelolaan atau manajemen

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani bertindak sebagai pengelola dari usahanya. Petani harus pandai mengorganisasi penggunaan faktor-faktor produksi yang dikuasai sebaik mungkin untuk memperoleh produksi secara maksimal, karena produktivitas masing-masing faktor produksi dan produktivitas usahatani merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan.

B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian merupakan salah satu

kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani dibina dan ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usahatani dengan lebih produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

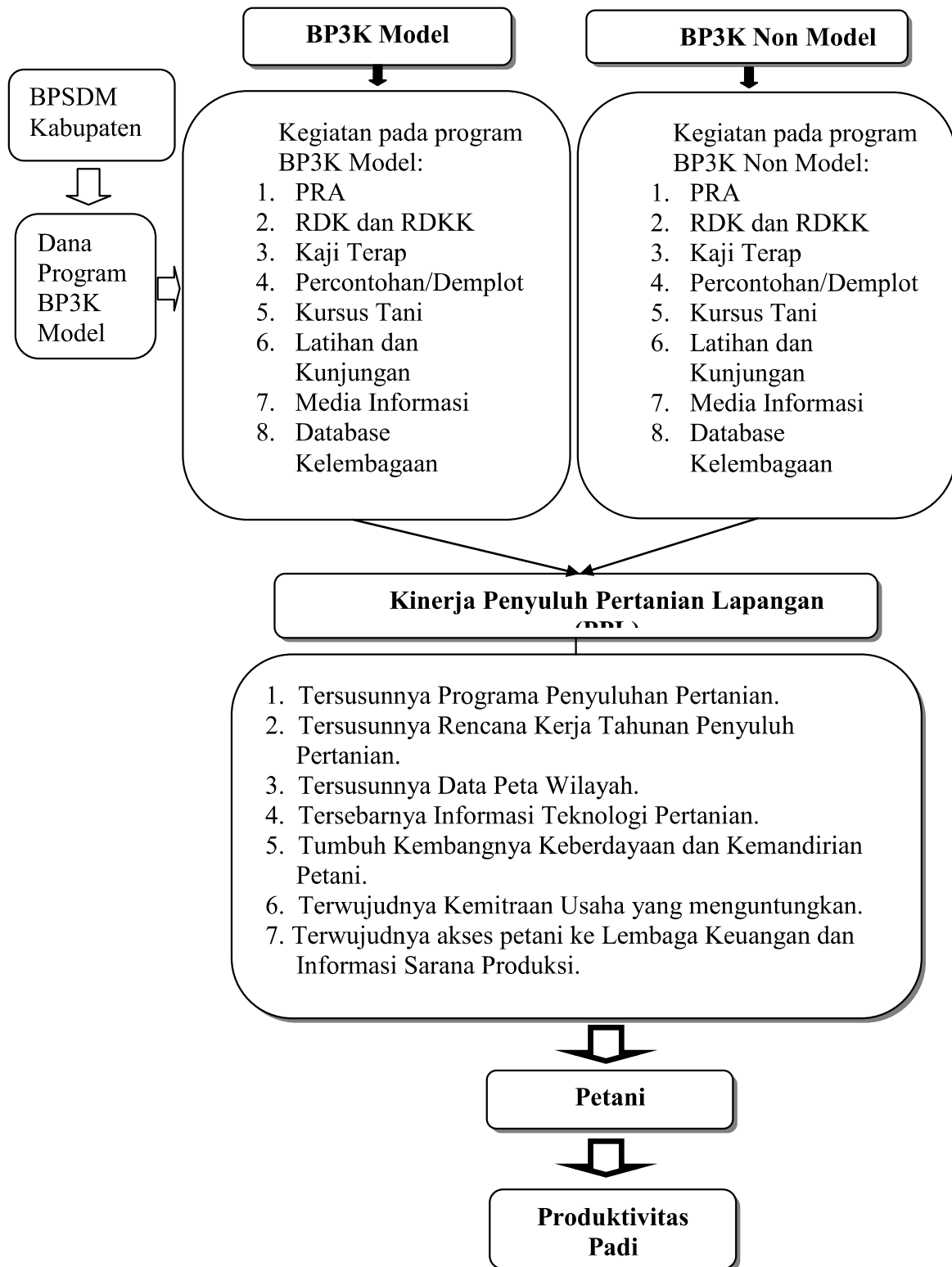
Kegiatan penyuluhan pertanian mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dan pendapatan petani.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu, pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten atau kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

Dalam rangka mendukung RPPK dan program aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, pemerintah mencanangkan pengembangan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Model. BP3K Model merupakan percontohan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang dirancang untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasi agribisnis yang memadai dan mampu memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Model diharapkan meningkatkan kinerja penyuluh, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan dari BP3K Model. Keberadaan penyuluh di

lingkungan masyarakat akan lebih membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam hal usahatani. Melalui program BP3K Model, penyuluh mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 100.000.000,00,- per BP3K untuk operasional kegiatan-kegiatan BP3K Model. Kegiatan yang ada di BP3K Model tersebut diantaranya PRA, Penyusunan RDK dan RDKK, Kaji Terap, Percontohan atau Demplot, Kursus Tani, Latihan dan Kunjungan, Media Informasi, serta pemutakhiran data base kelembagaan/ketenagaan penyuluhan.

Keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil produksi salah satunya adalah karena adanya campur tangan dari para penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian memberikan pembinaan dan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Selain itu juga menyebarkan inovasi serta teknologi kepada para petani sehingga petani dapat mengembangkan dan meningkatkan produksi usahatannya. Salah satu indikator adanya campur tangan penyuluh dalam perkembangan usahatani petani binaannya yaitu tingkat kinerja penyuluh pertanian itu sendiri. Apabila kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya telah baik, maka perkembangan petani yang dibinapun akan maksimal dan diharapkan kesejahteraan petani binaannya meningkat melalui peningkatan produksi dan pendapatan hasil usahatannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Paradigma kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan produktivitas padi di Kabupaten Tanggamus (Kasus di Wilayah Kerja BP3K Model Talang Padang dan BP3K Pugung).

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada perbedaan yang nyata antara kinerja PPL di BP3K Model Talang Padang dengan kinerja penyuluh BP3K Non Model Pugung di Kabupaten Tanggamus.
2. Diduga ada perbedaan yang nyata antara produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Model Talang Padang dengan produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Pugung kabupaten Tanggamus.
3. Diduga ada hubungan yang nyata antara tingkat kinerja PPL dengan produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Model Talang Padang.
4. Diduga ada hubungan yang nyata antara tingkat kinerja PPL dengan produktivitas padi di wilayah kerja BP3K Pugung Kabupaten Tanggamus.